

Laporan Keuangan Tahunan

20

24

AUDITED



Inspektorat Utama
BPOM

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Ittama BPOM adalah salah satu entitas akuntansi di bawah BPOM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Ittama BPOM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta perubahannya dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Ittama BPOM. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 6 Februari 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



Yudianto

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Ringkasan	
Laporan Realisasi Anggaran	4
Neraca	7
Laporan Operasional	8
Laporan Perubahan Ekuitas	9
Catatan atas Laporan Keuangan	10
Penjelasan Umum	10
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	31
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	42
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	49
Pengungkapan Penting Lainnya	53
Lampiran dan Daftar	

ITTAMA BPOM
GEDUNG GARUDA Lantai 1, JL. PERCETAKAN NEGARA NO 23 JAKARTA
TELEPON 021-477922, FAXIMILE 021-4246726

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Ittama BPOM yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 6 Februari 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



Yudianto

Laporan Keuangan Utama BPOM TA 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp33.750.695,00 dan tidak terdapat estimasi pendapatan.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2024 adalah sebesar Rp25.908.284.126,00 atau mencapai 93,55% dari alokasi anggaran sebesar Rp27.693.231.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember Tahun 2024. Nilai Aset per 31 Desember Tahun 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.217.184.372,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp295.712.950,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp880.864.532,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp40.606.890,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp40.267.087,00 dan Rp1.176.917.285,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode per 31 Desember tahun 2024 adalah sebesar Rp498.105,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp25.903.472.359,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp25.902.974.254,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar

Rp20.679.740,00 dan sebesar 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp25.882.294.514,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp1.192.177.247,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp25.882.294.514,00 dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp25.867.034.552,00 sehingga Ekuitas akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2024 adalah senilai Rp1.176.917.285,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

ITTAMA BPOM
TABEL 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024		% thd Angg	2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0,00	33.750.695,00	-	28.940.380,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	33.750.695,00	-	28.940.380,00
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	8.191.750.000,00	8.177.024.409,00	99,82	11.857.517.687,00
Belanja Barang	B.4	18.929.481.000,00	17.159.261.211,00	90,65	16.422.063.672,00
Belanja Modal	B.5	572.000.000,00	571.998.506,00	99,99	532.810.750,00
JUMLAH BELANJA		27.693.231.000,00	25.908.284.126,00	93,55	28.812.392.109,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, 6 Februari 2025
 Kuasa Pengguna Anggaran,


 Yudianto

ITTAMA BPOM
TABEL 2. NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	C.1.1	130.095.207,00	0,00
Persediaan	C.1.2	165.617.743,00	140.552.372,00
Jumlah Aset Lancar		295.712.950,00	140.552.372,00
ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	4.863.985.456,00	4.873.074.976,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.2	0,00	12.389.250,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.3	(3.983.120.924,00)	(3.794.660.702,00)
Jumlah Aset Tetap		880.864.532,00	1.090.803.524,00
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tidak Berwujud	C.4.1	1.085.450.767,00	947.226.561,00
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.2	32.169.860,00	
Akumulasi Penyusutan dan Amortisa	C.4.3	(1.077.013.737,00)	(933.164.843,00)
Jumlah Aset Lainnya		40.606.890,00	14.061.718,00
JUMLAH ASET		1.217.184.372,00	1.245.417.614,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	40.267.087	53.240.367,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		40.267.087,00	53.240.367,00
JUMLAH KEWAJIBAN		40.267.087,00	53.240.367,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	1.176.917.285,00	1.192.177.247,00
JUMLAH EKUITAS		1.176.917.285,00	1.192.177.247,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.217.184.372,00	1.245.417.614,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, 6 Februari 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,


Yudianto

III. LAPORAN OPERASIONAL

ITTAMA BPOM
TABEL 3. LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	498.105	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		498.105	0,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	8.131.881.269,00	11.907.867.936,00
Beban Persediaan	D.3	158.741.456,00	165.837.847,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	5.353.153.709,00	5.635.555.572,00
Beban Pemeliharaan	D.5	310.976.860,00	282.863.460,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	11.181.045.008,00	10.320.562.478,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	767.674.057,00	940.645.084,00
JUMLAH BEBAN		25.903.472.359,00	29.253.332.377,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(25.902.974.254,00)	(29.253.332.377,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		20.272.750,00	14.474.363,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		32.662.000,00	25.523.800,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		12.389.250,00	11.049.437,00
Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya		406.990,00	3.416.580,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		590.590,00	5.544.940,00
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya		183.600,00	2.128.360,00
Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	20.679.740,00	17.890.943,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(25.882.294.514,00)	(29.235.441.434,00)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNPB		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas		0,00	0,00
Beban Persediaan		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		(25.882.294.514,00)	(29.235.441.434,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, 6 Februari 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,


Yudianto

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

ITTAMA BPOM
TABEL 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023	Kenaikan/Penurunan
EKUITAS AWAL	E.1	1.192.177.247,00	1.644.166.952,00	(451.989.705,00)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(25.882.294.514,00)	(29.235.441.434,00)	3.353.146.920,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI				
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0,00	0,00	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0,00	0,00	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	0,00	0,00	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.4	0,00	0,00	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	0,00	0,00	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	0,00	0,00	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	25.867.034.552,00	28.783.451.729,00	(2.916.417.177,00)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E5	(15.259.962,00)	(451.989.705,00)	
EKUITAS AKHIR	E.6	1.176.917.285,00	1.192.177.247,00	(15.259.962,00)

Jakarta, 6 Februari 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



Yudianto

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKSANAAN TEKNIS ITTAMA BPOM

Profil dan Kebijakan Teknis Ittama BPOM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM sesuai:

Pasal 33

- 1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- 2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 34

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana: dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM dan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan BPOM.

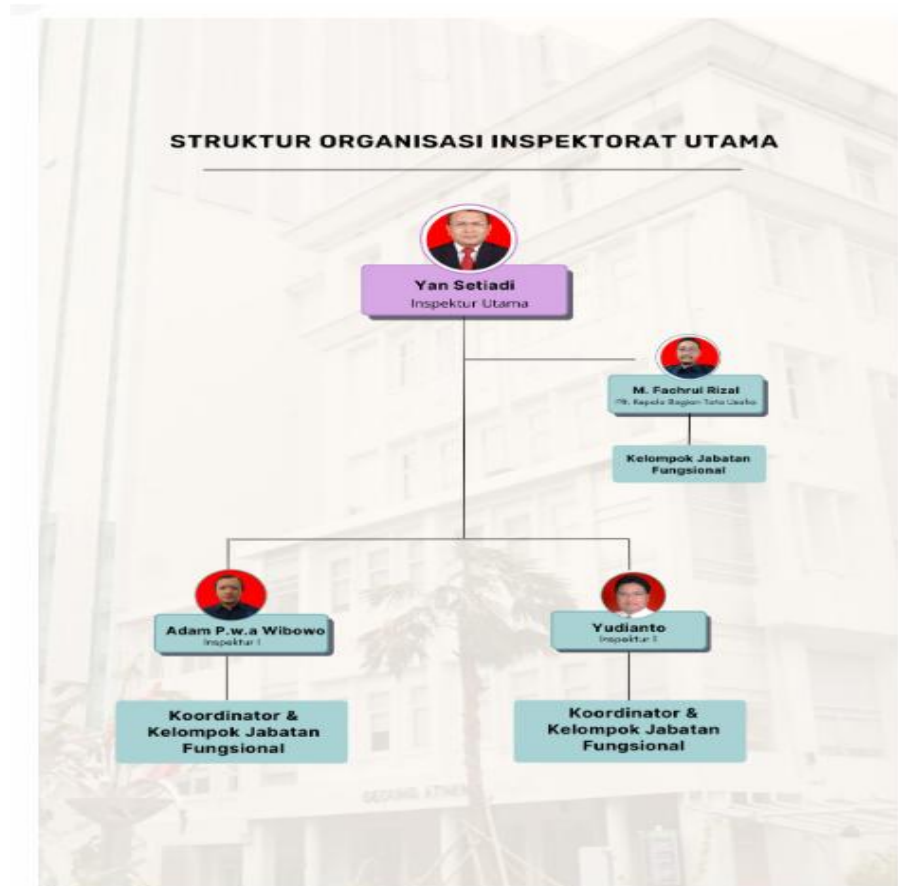
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Gambar 1. Struktur Organisasi Ittama



Renstra Ittama memuat visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi diisi

nama satker untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan program prioritas Presiden.

Visi BPOM Tahun 2019-2024:

Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong”

Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Ittama BPOM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Ittama BPOM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan perubahannya.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang ltama BPOM. dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari ltama BPOM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan POM sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Keputusan

Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Satker Ittama pada TA 2024 mendapat pendapatan diantaranya Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, Pendapatan Denda, dan Pendapatan Lain-Lain.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan program akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadi konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TGR.

- Persediaan merupakan aset yang berupa:
 1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
 - a. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetak (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pembanding, Hewan Percobaan;
 - b. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (Glassware) dan;
 - c. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
 2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan baku untuk pembuatan baku pembanding.
 3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, contoh: baku pembanding yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.
 4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan BPOM dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan Badan POM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (retain sample). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - a. Harga pembelian
 - b. Biaya pengangkutan
 - c. Biaya penanganan
 - d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.
2. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
 - a. Potongan harga
 - b. Rabat dan lainnya yang serupa.
3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh BPOM, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 05 Akuntansi Persediaan.

- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

1. Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
2. Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
3. Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (Satu) tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai PMK Nomor 181/PMK.06/2016 sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a) Tanah

b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KMK.6/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. **Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Aset Lain-Lain

e. **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Di Badan POM Amortisasi yang ada yaitu Software Komputer dengan masa manfaat selama 4 tahun.

Tabel 7. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 09 Akuntansi Kewajiban.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Ittama BPOM memiliki pagu awal tahun 2024 sebesar Rp32.161.297.000,00 kemudian melalui :

1. Surat Edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.01.2.21.01.24.10 perihal Revisi *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 Inspektorat melakukan *Automatic Adjustment* sebesar Rp999.793.000,00
2. Surat Edaran Sekretariat Utama nomor T-KU.02.03.2.21.05.24.390 Tanggal 17 Mei 2024 perihal Revisi Anggaran *Pilot Project* Pembayaran Tunjangan Kinerja Terpusat Badan POM TA 2024, terdapat pengurangan Belanja Pegawai senilai Rp4.468.066.000,00. Sehingga pagu Satuan Kerja Ittama sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp27.693.231.000,00.

Selama periode berjalan, Ittama BPOM telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 9 kali. Hal ini disebabkan oleh adanya penyamaan data dengan Kanwil DJPB, revisi Halaman 3 DIPA/Rencana Penarikan Dana dan Revisi penambahan anggaran belanja pegawai terkait penambahan SDM di lingkup Ittama dengan perincian:

1. Revisi DIPA Kewenangan DJA (18 Januari 2024) sehubungan dengan tindak lanjut penyesuaian belanja barang dan belanja modal yang berasal dari blokir *Automatic Adjustment* TA. 2024
2. Revisi DIPA kewenangan kanwil DJPB (12 Februari 2024) Revisi Administrasi dan Perubahan Rencana Penarikan Dana halaman III DIPA.

3. Revisi DIPA kewenangan kanwil DJPB (17 April 2024) Revisi Administrasi dan Perubahan Rencana Penarikan Dana halaman III DIPA.
4. Revisi DIPA Kewenangan DJA (3 Juni 2024) sehubungan dengan Dalam Rangka Pilot Project Pembayaran Tunjangan Kinerja Terpusat Badan POM TA 2024
5. Revisi DIPA kewenangan kanwil DPJB (15 Juli 2024) Revisi Administrasi dan Perubahan Rencana Penarikan Dana halaman III DIPA.
6. Revisi DIPA kewenangan kanwil DPJB (27 September 2024) Revisi Administrasi dan Perubahan Rencana Penarikan Dana halaman III DIPA.
7. Revisi DIPA kewenangan kanwil DPJB (10 Oktober 2024) Revisi Administrasi dan Perubahan Rencana Penarikan Dana halaman III DIPA.
8. Revisi DIPA Kewenangan DJA (5 November 2024) sehubungan dengan Dalam Rangka Revisi Anggaran RO SBKU dan Revisi Anggaran Kewenangan DJA TA 2024.
9. Revisi DIPA kewenangan Kanwil DPJB (29 Desember 2024) Revisi Pemuktahiran POK

Perubahan anggaran sebelum dan setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Perincian Anggaran Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	0,00	0,00
Belanja		
Belanja Pegawai	12.659.816.000,00	8.191.750.000,00
Belanja Barang	18.929.481.000,00	18.929.481.000,00
Belanja Modal	572.000.000,00	572.000.000,00
Jumlah Belanja	32.161.297.000,00	27.693.231.000,00

Realisasi Pendapatan
Rp33.750.695,00

B.1 Pendapatan

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp33.750.695,00 dan tidak terdapat estimasi

pendapatan pada Ittama BPOM. Pendapatan Ittama BPOM terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 10. Perincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
(dalam rupiah)

No	MAP	Uraian	MAK	Uraian	Per 31 Desember 2024		
					Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1	4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	32.662.000,00	-
2	4258	Pendapatan Denda	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	498.105,00	-
2	4259	Pendapatan Lain-Lain	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0,00	90.590,00	-
2	4259	Pendapatan Lain-Lain	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0,00	500.000,00	-
Jumlah Kotor					0,00	33.750.695,00	-
Pengembalian Pendapatan						0,00	-
Pendapatan Bersih						33.750.695,00	-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 16,62% dibandingkan TA 2023. Kenaikan realisasi disebabkan terdapat penambahan signifikan atas Penjualan/Lelang BMN.

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 30 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	33,750,695.00	28,940,380.00	16.62
Jumlah	33,750,695.00	28,940,380.00	16.62

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Ittama BPOM s.d 31 Desember 2024 merupakan Pendapatan dari:

1. Pemindahtanganan BMN Lainnya yaitu Lelang aset non lancar sesuai Risalah Lelang Nomor 347/07.04/2024-01 Tanggal 15 Agustus 2024, dengan perincian:

No	Uraian	No NTPN	Tanggal Setor	Jumlah
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	B39F01JNFVBPM8S	22/08/2024	32.662.000,00

2. Pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian kontrak Pengembangan Aplikasi SAPA APIP dengan SPK No. PL.02.01.73.03.24.108 Tgl 25 Maret 2024, Adendum No. PL.02.01.73.07.24.216 Tgl 12 Juli 2024, BAST No. PL.02.01.73.07.24.224 Tgl 26 Juli 2024 dan BAP No. PL.02.01.73.07.24.226 Tgl 26 Juli 2024, yang dipotong langsung dari SPM dengan perincian:

No	Uraian	Nomor/Tgl SPM	Nomor/Tgl SP2D	Jumlah
1	Pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian kontrak Pengembangan Aplikasi SAPA APIP (dipotong dari SPM)	00852T/433005/2024 Tgl 26/07/2024	241751302035020 Tgl 30/07/2024	498.105,00

3. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL senilai Rp90.590,00 terdiri dari:

No	Uraian	No NTPN	Tanggal Setor	Jumlah
1	Pengembalian Uang Makan Bulan Desember 2023	8E8A20NA0448M MR4	12/01/2024	31.850,00
2	Pengembalian Tukin Bulan Desember 2023	BC87A48VVEDMUP AO	12/01/2024	58.740,00
Jumlah				90.590,00

4. Penerimaan kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu senilai Rp500.000,00 yang terdiri dari

No	Uraian	No NTPN	Tanggal Setor	Jumlah
1	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	076F455DF90 3C2ID	11/01/2024	500.000,00
Jumlah				500.000,00

Realisasi Belanja

B.2 Belanja

Negara

Rp25.908.284.126,00

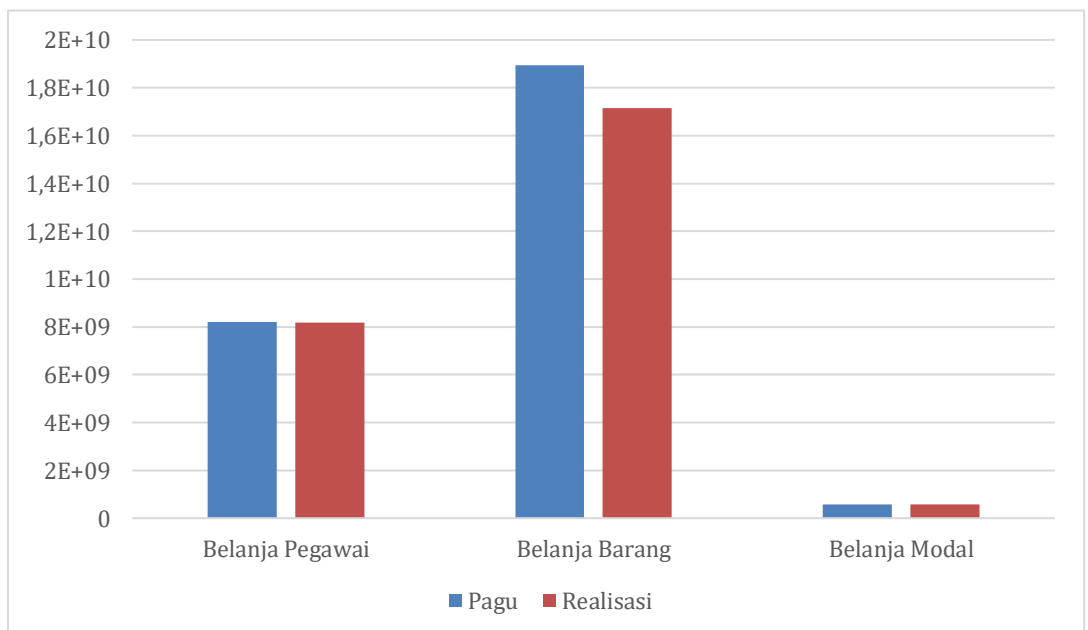
Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp25.908.284.126,00 atau 93,55% dari anggaran belanja sebesar Rp 27.693.231.000,00. Anggaran Satker Utama termasuk nilai yang diblokir untuk *Automatic Adjustment*. Perincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	8.191.750.000,00	8.195.922.870	100,05
Belanja Barang	18.929.481.000,00	17.260.296.382	91,18
Belanja Modal	572.000.000,00	571.998.506	100,00
Total Belanja Kotor	27.693.231.000	26.028.217.758,00	93,99
Pengembalian		119.933.632,00	-
Jumlah	27.693.231.000	25.908.284.126,00	93,55

Komposisi anggaran dan realisasi belanja untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat dalam grafik tahun ini:



Terdapat pengembalian belanja senilai Rp119.933.632,00 dan terhadap pengembalian belanja ini dilakukan pemulihan pagu sebesar Rp105.224.859,00 , dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 13. Pengembalian Belanja dan Pulih Pagu
31 Desember 2024**

(dalam rupiah)

No.	No Dokumen	Uraian	NILAI SP2D	Pulih Pagu
1	00001/SSPB/433005/2024 F39C445KPSEBFT30	Belanja Tunj. Struktural PNS	4.100.000,00	4.100.000,00
2	00024T	Belanja Pembulatan Gaji PNS	37,00	0,00
3	00023T	Belanja Pembulatan Gaji PNS	193,00	0,00
4	00309T	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.562,00	0,00
5	00400T	Belanja Pembulatan Gaji PNS	981,00	0,00
6	00003/SSPB/433005/2024 868980JUQLQHBU4M	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	89.688,00	89.688,00
7	00002/SSPB/433005/2024 D9CE42CPQ87CEKC2	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	136.000,00	136.000,00
8	00007/SSPB/433005/2024 315460JUQMMLLAHUM	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	97.539.171,00	97.539.171,00
9	00400T	Belanja Tunjangan Umum PNS	14.705.000,00	
10	00591T	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.360.000,00	3.360.000,00
	Pengembalian Belanja		119.933.632,00	105.224.859,00

Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023, Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 10,08%.

**Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	8.177.024.409,00	11.857.517.687,00	(31,04)
Belanja Barang	17.159.261.211,00	16.422.063.672,00	4,49
Belanja Modal	571.998.506,00	532.810.750,00	7,35
Jumlah	25.908.284.126,00	28.812.392.109,00	(10,08)

*Belanja Pegawai**Rp8.177.024.409,00***B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.177.024.409,00 dan Rp11.857.517.687,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 31,04% dibanding periode yang sama tahun 2023. Penurunan ini secara signifikan terlihat di belanja pegawai, sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Sekretaris Utama nomor T-KU.02.03.2.21.05.24.390 Tanggal 17 Mei 2024 perihal Revisi Anggaran Pilot Project Pembayaran Tunjangan Kinerja Terpusat Badan POM TA 2024, terdapat pengurangan Belanja Pegawai senilai Rp4.468.066.000,00 yang diserahkan ke Sekretariat Utama, sehingga pencairan Tunjangan Kinerja tidak lagi di internal Ittama namun telah terpusat di Sestama BPOM. Perincian perbandingan belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebagai berikut:

**Tabel 15. Perbandingan Belanja Pegawai
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.681.437.370,00	5.233.252.332,00	8,56
Belanja Lembur	51.552.000,00	28.599.000,00	80,26
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus Kegiatan)	2.462.933.500,00	6.601.780.377,00	(62,69)
Jumlah Belanja Kotor	8.195.922.870,00	11.863.631.709,00	(30,92)
Pengembalian Belanja Pegawai	18.898.461,00	6.114.022,00	209,10
Jumlah Belanja	8.177.024.409,00	11.857.517.687,00	(31,04)

Sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat Pengembalian belanja pegawai senilai Rp18.898.461,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 16. Perincian Pengembalian Belanja Pegawai dan Pulih Pagu 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

MAK	URAIAN	Nilai	No Dokumen	Pulih Pagu
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	37,00	00024T	-
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	193,00	00023T	-
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.562,00	00309T	-
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	981,00	00309T	-
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4.100.000,00	0001/SSPB/433005/2024 F39C445KPSEBFT30	4.100.000,00
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	14.705.000,00	-	-
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	89.688,00	00003/SSPB/433005/2024 868980JUQLQHB U4M	89.688,00
Jumlah Pengembalian belanja pegawai dan Pulih Pagu		18.898.461,00		4.189.688,00

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp17.159.261.211,00

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp17.159.261.211,00 dan Rp16.422.063.672,00. Realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,49% dibandingkan realisasi belanja barang yang berakhir 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Peningkatan Belanja Perjalanan dalam Negeri karena bertambahnya intensitas perjalanan dalam mewujudkan pengawasan internal melalui penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*trusted advisor*)
2. Peningkatan Belanja Pemeliharaan untuk mempertahankan performa dan kapasitas aset-aset lama
3. Peningkatan Belanja Barang Non Operasional dikarenakan meningkatnya volume kegiatan Satuan Kerja Utama

Rincian perbandingan belanja barang untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

**Tabel 17. Perbandingan Belanja Barang
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.509.317.117,00	1.992.042.973,00	(24,23)
Belanja Barang Non Operasional	1.660.058.411,00	1.244.568.960,00	33,38
Belanja Barang Persediaan	183.990.427,00	183.082.162,00	0,50
Belanja Jasa	2.314.009.388,00	2.398.943.639,00	(3,54)
Belanja Pemeliharaan	310.976.860,00	282.863.460,00	9,94
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	11.278.109.179,00	10.340.963.117,00	9,06
Belanja Perjalanan Luar Negeri	3.835.000,00	0,00	-
Jumlah Belanja Kotor	17.260.296.382,00	16.442.464.311,00	4,97
Pengembalian Belanja	101.035.171,00	20.400.639,00	395,25
Jumlah Belanja	17.159.261.211,00	16.422.063.672,00	4,49

Sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat pengembalian belanja senilai Rp101.035.171,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 18. Perincian Pengembalian Belanja Barang 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	No Dokumen	MAK	Uraian	Nilai
1	00002/SSPB/4 33005/2024 D9CE42CPQ87 CEKC2	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	136.000,00
2	00007/SSPB/4 33005/2024 315460JUQML LAHUM	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	97.539.171,00
3	00591T	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.360.000,00
Jumlah Pengembalian Belanja dan Pulih Pagu				101.035.171,00

Belanja Modal
Rp571.998.506,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp571.998.506,00 dan Rp.532.810.750,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,35% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 disebabkan pagu belanja modal juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya serta kebutuhan akan belanja modal peralatan dan mesin juga meningkat.

**Tabel 19. Perbandingan Belanja Modal
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan & Mesin	433.774.300,00	387.940.000,00	11,81
Belanja Modal Lainnya	138.224.206,00	144.870.750,00	100,00
Jumlah Belanja Kotor	571.998.506,00	532.810.750,00	7,35
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	571.998.506,00	532.810.750,00	7,35

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp433.774.300,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp433.774.300,00 dan Rp387.940.000,00 mengalami kenaikan sebesar 11,81% dibandingkan realisasi tahun 2023 karena kebutuhan alat rumah tangga mengalami kenaikan. Realisasi belanja peralatan dan mesin dirinci sebagai berikut:

**Tabel 22. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode
yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK (TURUN) %
Alat Kantor	53.455.000,00	8.250.000,00	-
Alat Rumah Tangga	196.544.300,00	0,00	-
Alat Studio	0,00	4.490.000,00	-
Komputer Unit	183.775.000,00	0,00	-
Alat Pengolah Data	0,00	321.900.000,00	-
Peralatan Komputer	0,00	53.300.000,00	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	433.774.300,00	387.940.000,00	11,81
Pengembalian	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja	433.774.300,00	387.940.000,00	11,81

Belanja Modal Lainnya
Rp138.224.206,00

B.5.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp138.224.206,00 dan Rp144.870.750,00. Belanja modal lainnya senilai Rp138.224.206,00 merupakan pengembangan aset dengan nomor SP2D **241751302035020** tanggal **30 Juli 2024** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Belanja Modal Lainnya

No.	Nama Barang	Jumlah Unit	Jumlah Rupiah	No dan Tanggal SP2D
1	Pengembangan Aplikasi SAPA APIP untuk penambahan fitur	1 Unit	Rp138.224.206,00	241751302035020 Tgl 30 Juli 2024
Jumlah			Rp138.224.206,00	

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp295.712.950,00

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Satuan Kerja Utama BPOM per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp295.712.950,00 dan Rp140.552.372,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp130.095.207,00 dan Rp0,00 Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Belanja dibayar di muka :

No.	Nama Pekerjaan	Akun	Rupiah Akrual (Prepaid) di TA 2025	No SPK/No Kuitansi	Masa Berlaku	Nilai Kontrak/Kuitansi
1	Sewa Rumah Dinas	5221 41	128,699,342,00	SPK No.PL.02.02.73.09.24. 327 Tanggal 30 September 2024, BAST No.PL.02.02.73.10.24. 335 Tgl 1 Oktober 2024	1 Oktober 2024 s.d. 31 Juli 2025	184,550,000,00
2	Canva	5211 11	373,770,00	Kuitansi No.00143/KW/KKP/43 3005/2024 Tgl 19 Maret 2024	13 Maret 2024 sd 12 Maret 2025	1,900,000,00
3	QR Code	5211 11	1,022,094,00	Kuitansi No.00115/KW/KKP/43 3005/2024 Tgl 23 Februari 2024	23 Februari 2024 s.d. 22 Februari 2025	7,058,237,00
Jumlah			130,095,207			

Rincian belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut

Tabel 26. Perincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

JENIS	REALISASI 2024	REALISASI 2023
Belanja Barang dibayar dimuka	130.095.207,00	0,00
Jumlah	130.095.207,00	0,00

Persediaan
Rp165.617.743,00

C.1.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp165.617.743,00 dan Rp140.552.372,00 dengan perincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Perincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

JENIS	SALDO PERSEDIAAN 2024	SALDO PERSEDIAAN 2023
Barang Konsumsi	165.617.743,00	140.552.372,00
Jumlah	165.617.743,00	140.552.372,00

Sesuai Berita Acara Stock Opname Persediaan No.PL.03.01.73.12.24.363 Tanggal 31 Desember 2024 dan tidak terdapat barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang.

Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Negara Persediaan No. PL.03.09.73.09.24.329 tanggal 27 September 2024 bahwa terdapat pemusnahan persediaan senilai Rp183.600,00 yang telah dimusnahkan.

Aset Tetap
Rp880.864.532,00

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Satuan Kerja Inspektorat Utama per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp880.864.532,00 dan Rp1.090.803.524,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Satuan Kerja Ittama BPOM berupa Alat Angkut, Peralatan dan Mesin.

C.2.1 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember

Peralatan dan Mesin
Rp4.863.985.456,00

2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp4.863.985.456,00 dan Rp4.873.074.976,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 28. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	4.873.074.976,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	433.774.300,00
Reklasifikasi Masuk	18.772.182,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	1.240.000,00
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	(398.859.310,00)
Reklasifikasi Keluar	(18.772.182,00)
Transfer Keluar	(44.004.510,00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(1.240.000,00)
Saldo per 31 Desember 2024	4.863.985.456,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(3.983.120.924,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	880.864.532,00

Penambahan nilai peralatan dan Mesin hingga 31 Desember 2024 dengan perincian :

- 1) Transaksi pembelian sebesar Rp433.774.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29. Perincian Pembelian

(dalam rupiah)

No.	Nama Barang	Jumlah Unit	Jumlah Rupiah
1	Lemari Besi/Metal	5 Unit	27.050.000,00
2	Lemari Kayu	18 Unit	26.405.000,00
3	Kursi Besi/Metal	18 Unit	37.260.000,00
4	Workstation	6 Unit	113.250.000,00
5	Karpet	2 Unit	26.242.300,00
6	Note Book	11 Unit	155.075.000,00
7	Tablet PC	3 Unit	28.700.000,00
8	Tempat Tidur Kayu	1 Unit	2.958.000,00
9	Kasur/Spring Bed	1 Unit	1.718.000,00
10	Televisi	1 Unit	3.100.000,00
11	Dispenser	5 Unit	12.016.000,00
Jumlah			433.774.300,00

2) Reklasifikasi masuk sebesar Rp18.772.182,00 merupakan transaksi reklas masuk karena adanya kesalahan pencatatan kodefikasi barang yang sebelumnya kode barang 3.07.01 (Alat Kedokteran Bedah-Kursi Zeis) di reklas menjadi kode barang 3.05.02 (Alat Rumah Tangga-Kursi Besi/Metal) sebanyak 13 unit sesuai dengan surat keterangan nomor PL.03.01.73.08.24.55 tanggal 30 Agustus 2024.

3) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan transaksi koreksi pencatatan nilai bertambah karena adanya kesalahan pencatatan harga satuan barang sebanyak 1 unit berupa Kasur/Spring Bed sesuai dengan surat keterangan nomor PL.03.01.73.09.24.66 tanggal 30 September 2024.

Sedangkan untuk pengurangan Peralatan dan Mesin hingga 31 Desember 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1) Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp1.240.000,00 merupakan transaksi koreksi pencatatan nilai berkurang karena adanya kesalahan pencatatan harga satuan barang sebanyak 1 unit berupa Tempat Tidur Kayu sesuai dengan surat keterangan nomor PL.03.01.73.09.24.66 tanggal 30 September 2024.

2) Transfer keluar sebesar Rp44.004.510,00 ke Satker Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebanyak 2 unit berupa Note Book sesuai BAST No. PL.03.07.73.08.24.283 tanggal 15 Agustus 2024.

3) Reklasifikasi keluar sebesar Rp18.772.182,00 merupakan transaksi reklas keluar karena adanya kesalahan pencatatan kodefikasi barang yang sebelumnya kode barang 3.07.01 (Alat Kedokteran Bedah-

Kursi Zeis) di reklas menjadi kode barang 3.05.02 (Alat Rumah Tangga-Kursi Besi/Metal) sebanyak 13 unit sesuai dengan surat keterangan nomor PL.03.01.73.08.24.55 tanggal 30 Agustus 2024.

4) Penghentian aset dari Penggunaan sebesar Rp398.931.099,00 sebanyak 51 Unit terjadi karena kondisi barang rusak berat (RB) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Jumlah (Rupiah)
1	Kursi Besi/Metal	2	2.549.316,00
2	Workstation	1	36.500.000,00
3	Lemari Es	1	3.040.500,00
4	Teko Listrik	3	2.341.500,00
5	Dispenser	4	4.014.000,00
6	Kursi Zeis	1	1.444.014,00
7	PC Unit	7	59.944.980,00
8	Note Book	17	189.249.000,00
9	Tablet PC	3	11.997.000,00
10	Printer	11	80.545.000,00
11	Scanner	1	7.234.000,00
Jumlah		51	398.859.310,00

C.5 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya
Rp0,00*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0,00 dan Rp12.389.250,00 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 29. Perincian mutasi tambah dan kurang atas Aset tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2024	12.389.250,00
Mutasi tambah:	
-	0,00
Mutasi kurang:	
- Penghentian Aset dari Penggunaan	(12.389.250,00)
Saldo per 31 Desember 2024	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0,00

Aset tetap lainnya tersebut berupa Monografi dan buku lainnya telah dilakukan penghentian atas penggunaannya sesuai dengan surat keterangan No. PL.03.09.73.06.24.34 tanggal 21 Juni 2024 dan telah dihapuskan sesuai dengan Surat Keputusan KPB No. HK.02.02.72.08.24.34 Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024.

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp3.983.120.924,00*

C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp3.983.120.924,00 dan Rp3.794.660.702,00 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 30. Perincian Akumulasi
Aset Tetap
Per 31 Desember 2024**

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.863.985.456,00	3.983.120.924,00	880.864.532,00
	Akumulasi Penyusutan	4.863.985.456,00	3.983.120.924,00	880.864.532,00

*Aset Tak Berwujud
Rp1.085.450.767,00*

C.7 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp1.085.450.767,00 dan Rp947.226.561,00

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**Tabel 31. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud
(dalam rupiah)**

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2024	947.226.561,00
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	138.224.206,00
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	1.085.450.767,00
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(1.077.013.737,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	8.437.030,00

Penambahan aset tak berwujud berasal dari pengembangan aset berupa penambahan dan perbaikan fitur-fitur software aplikasi SAPA APIP NUP 9 dengan SP2D No. 241751302035020 Tanggal 30 Juli 2024. Perincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Perincian Aset Tak berwujud per 31 Desember 2024

No.	Kode Barang	NUP	Uraian	Saldo 1 Januari 2024	Pengembangan	Saldo Per 31 Desember 2024
1	8.01.01.01.001	9	Aplikasi SAPA APIP, semula bernama SIMOLEKDESI, yang digunakan untuk database pengawasan intern	545.910.250,00	138.224.206,00	684.134.456,00
2	8.01.01.01.001	10	Aplikasi SOLUSI yang digunakan sebagai media untuk layanan konsultasi bagi mitra pengawasan dengan auditor Inspektorat Utama;	240.217.561,00	-	240.217.561,00
3	8.01.01.01.001	11	Aplikasi INSPIRING AUDIT, semula bernama SITAMPAN ADI/SIMWAS, yang merupakan sistem elektronik dan terintegrasi mulai dari tahapan perencanaan audit berbasis resiko, penugasan audit, pelaksanaan audit, perumusan rekomendasi hingga pelaporan hasil audit	138.600.000,00	-	138.600.000,00
4	8.01.01.01.001	12	Aplikasi E-MONEV RB adalah yang membantu dalam monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan RB di Badan POM agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map RB dapat berjalan sesuai jadwal, target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.	22.498.750,00	-	22.498.750,00

			Jumlah	947.226.561,00	138.224.206,00	1.085.450.767,00
--	--	--	--------	----------------	----------------	------------------

C.8 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatasi penggunaannya Rp32.169.860,00

Dana yang dibatasi penggunaannya berasal dari transaksi RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun) yang BAST nya telah dicatat pada tahun 2024 namun proses pembayarannya dilakukan di tahun 2025. Rincian Dana yang dibatasi penggunaannya adalah Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran Termin ke Enam sesuai BAST Nomor PL.02.01.73.12.24.357 Tanggal 31 Desember 2024, SPM no. 00002T/433005/2025 Tgl 3 Januari 2025 SP2D No.259991301001297 Tgl 8 Januari 2025 sebesar Rp.32.169.860,00

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp1.077.013.737,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp1.077.013.737,00 dan Rp933.164.843,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 34. Perincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	1.085.450.767,00	1.077.013.737,00	8.437.030,00
Jumlah	1.085.450.767,00	1.077.013.737,00	8.437.030,00

*Kewajiban Jangka
Pendek
Rp40.267.087,00*

C.5 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Satuan Kerja Utama per Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp40.267.087,00 dan Rp53.240.367,00.

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak
Ketiga Rp40.267.087,00*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp40.267.087,00 dan Rp53.240.367,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Utang pihak ketiga per tanggal neraca terdiri dari :

No.	Uraian	Jenis belanja	Jumlah
1	Uang Lembur PNS tahun 2024	51	5.565.000,00
2	Kekurangan Gaji atas KGB TMT 1 Desember 2024 dengan No SP2D 251751302000025	51	2.532.227,00
3	Pembayaran Pengadaan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran sesuai BAST Nomor PL.02.01.73.12.24.357 Tanggal 31 Desember 2024, SPM no. 00002T/433005/2025 Tgl 3 Januari 2025 SP2D No.259991301001297 Tgl 8 Januari 2025 (RPATA)	52	32.169.860,00
	Jumlah		40.267.087,00

Tabel 36. Perincian Utang Pihak Ketiga

NO	AKUN	URAIAN	JUMLAH
1	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	8,097,227.00
2	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	32,169,860.00
Total			40,267,087.00

Ekuitas

Rp1.176.917.285,00

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.176.917.285,00 dan Rp.1.192.177.247,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Perincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**Pendapatan****PNBP**

Rp498.105,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp498.105,00 dan Rp0,00.

Tabel 37. Perbandingan Perincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023
Pendapatan Jasa	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	498.105,00	0,00
Jumlah	498.105,00	0,00

Beban Pegawai

Rp8.131.881.269,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.131.881.269,00 dan Rp11.907.867.936,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik

dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 38. Perincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.910.324.427,00	3.602.733.280,00	8,54
Beban Pembulatan Gaji PNS	59.980,00	64.686,00	(7,28)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	221.327.670,00	191.842.984,00	15,37
Beban Tunj. Anak PNS	53.034.610,00	46.147.228,00	14,92
Beban Tunj Struktural PNS	128.260.000,00	169.390.000,00	(24,28)
Beban Tunj Fungsional PNS	578.340.000,00	491.565.000,00	17,65
Beban Tunj PPH PNS	39.701.693,00	26.041.498,00	52,46
Beban Tunj. Beras PNS	182.860.500,00	176.415.120,00	3,65
Beban Uang Makan PNS	487.361.000,00	502.350.800,00	(2,98)
Beban Tunj Umum PNS	26.045.000,00	62.560.000,00	(58,37)
Beban Lembur	41.929.000,00	41.946.000,00	(0,04)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2.462.637.389,00	6.596.811.340,00	(62,67)
Jumlah	8.131.881.269,00	11.907.867.936,00	(31,71)

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp158.741.456,00*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp158.741.456,00 dan Rp165.837.847,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Perincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 39. Perincian Beban Persediaan
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)**

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	158.741.456,00	165.837.847,00	(4,28)
Jumlah	158.741.456,00	165.837.847,00	(4,28)

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp5.353.153.709,00*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.353.153.709,00 dan Rp5.635.555.572,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Perincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 40. Perincian Beban Barang dan Jasa
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)**

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan perkantoran	1.379.682.322,00	1.795.607.473,00	(23,16)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.250.930,00	408.500,00	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	125.852.000,00	183.042.000,00	(31,24)
Beban Barang Operasional Lainnya	0,00	12.985.000,00	(100,00)
Beban bahan	643.779.911,00	469.621.460,00	37,08
Beban Barang Non Operasional Lainnya	996.947.100,00	761.530.100,00	30,91
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	19.331.400,00	12.967.400,00	49,08
Beban Jasa Konsultan	65.653.000,00	0,00	-
Beban Sewa	286.894.417,00	582.544.029,00	(50,75)
Beban Jasa Profesi	282.150.000,00	275.850.000,00	2,28
Beban Jasa Lainnya	1.550.612.629,00	1.540.829.610,00	0,63
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	170.000,00	(100,00)
Jumlah	5.353.153.709,00	5.635.555.572,00	(5,01)

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp310.976.860,00*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp310.976.860,00 dan Rp282.863.460,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Perincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 41. Perincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	310.976.860,00	282.863.460,00	9,94
Jumlah	310.976.860,00	282.863.460,00	9,94

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp11.181.045.008,00

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.181.045.008,00 dan Rp10.320.562.478,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Perincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 42. Perincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	6.627.458.060,00	5.857.386.292,00	13,15
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	229.967.900,00	181.552.660,00	26,67
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.533.394.596,00	786.957.100,00	94,85
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.786.389.452,00	3.494.666.426,00	-20,27
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	3.835.000,00	-	-
Jumlah	11.181.045.008,00	10.320.562.478,00	8,34

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp767.674.057,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp767.674.057,00 dan Rp940.645.084,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 43. Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	623.825.163,00	643.451.617,00	(3,05)
Jumlah Beban Penyusutan	623.825.163,00	643.451.617,00	(3,05)
Beban Amortisasi Software	143.848.894,00	297.193.467,00	(51,60)
Jumlah Beban Amortisasi	143.848.894,00	297.193.467,00	(51,60)
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam operasional Pemerintah	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	767.674.057,00	940.645.084,00	(18,39)

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp20.679.740,00

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 44. Perincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR	20.272.750,00	14.474.363,00	
Pendapatan pelepasan aset non lancar	32.662.000,00	25.523.800,00	-
Beban pelepasan aset non lancar	12.389.250,00	11.049.437,00	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	406.990,00	3.416.580,00	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	590.590,00	5.544.940,00	(89,35)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	183.600,00	2.128.360,00	-
Jumlah Surplus /(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	20.679.740,00	17.890.943,00	15,59
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	20.679.740,00	17.890.943,00	15,59

Penjelasan dari kegiatan non operasional sebagai berikut :

1. Pendapatan pelepasan aset non lancar berasal dari Lelang BMN sesuai Risalah Lelang Nomor 347/07.04/2024-01 Tanggal 15 Agustus 2024, dengan perincian:

No	Uraian	No NTPN	Tanggal Setor	Jumlah
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	B39F01JNFV/BPM8S	22/08/2024	32.662.000

2. Beban pelepasan aset non lancar sebesar Rp12.389.250,00 merupakan penghapusan aset tetap berupa buku pustaka yang masih memiliki nilai buku sebesar Rp12.389.250,00

3. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp590.590,00 berasal dari Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL senilai Rp90.590,00 dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu senilai Rp500.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	No NTPN	Tanggal Setor	Jumlah
1	Pengembalian Uang Makan Bulan Desember 2023	8E8A20NA0448M MR4	12/01/2024	31.850,00
2	Pengembalian Tukin Bulan Desember 2023	BC87A48VVEDMUP/ O	12/01/2024	58.740,00
3	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	076F455DF903 C2ID	11/01/2024	500.000,00
Jumlah				590.590,00

4. Beban dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp183.600,00 merupakan penghapusan persediaan yang kondisinya rusak/usang.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp1.192.177.247,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.192.177.247,00 dan Rp1.644.166.952,00.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp25.882.294.514,0
0

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp25.882.294.514,00 dan Rp29.235.441.434,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai
Aset
Rp0,00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0,00

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

Koreksi atas
reklasifikasi Rp0,00

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi persediaan/Aset tetap/Aset lainnya merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Selisih atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0,00

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

*Koreksi Lain-Lain
Rp0,00*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang

E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas
Rp25.867.034.552,0
0*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp25.867.034.552,00 dan Rp28.783.451.729,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 47. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	25,908,284,126.00
Diterima dari Entitas Lain	(33,750,695.00)
Transfer Keluar	(7,498,879.00)
Jumlah	25,867,034,552.00

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp25.908.284.126,00. Perincian atas realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 49. Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	8.191.750.000,00	8.177.024.409,00	99,82
Belanja Barang	18.929.481.000,00	17.159.261.211,00	90,65
Belanja Modal	572.000.000,00	571.998.506,00	100,00
Jumlah	27.693.231.000,00	25.908.284.126,00	93,55

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan. Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp33.750.695,00. Perincian Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain (DDEL) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 48. Perincian Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	No NTPN	Tanggal Setor	Jumlah
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Risalah Lelang Nomor 347/07.04/2024-01 Tanggal 15 Agustus 2024	B39F01JNFVBPM8S	22/08/2024	32.662.000,00
2	Pendapatan atas denda keterlambatan pekerjaan pengadaan aplikasi SAPA APIP (dipotong dari SPM)	SPM No. 00852T/433005/2024	SP2D No. 241751302 035020 Tgl 30/07/2024	498.105,00
3	Pengembalian Uang Makan Bulan Desember 2023	8E8A20NA0448M MR4	12/01/2024	31.850,00
4	Pengembalian Tukin Bulan Desember 2023	BC87A48VVEDMU PAO	12/01/2024	58.740,00
5	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	076F455DF903C 2ID	11/01/2024	500.000,00
JUMLAH				33.750.695,00

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer keluar sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 44.004.510,00 dengan nilai buku Rp7.498.879,00. Transfer keluar tersebut merupakan mutasi aset ke Satker Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, berupa notebook 2 unit sesuai dengan BA nomor PL.03.07.73.08.24.283 tanggal 15 Agustus 2024 (terlampir).

Ekuitas Akhir
Rp1.176.917.285,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.176.917.285,00 dan Rp1.192.177.247,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting sampai dengan 31 Desember 2024 pada Satuan Kerja Utama BPOM semuanya berjalan sesuai aturan yang berlaku.

F.2 PENGELOLA KEUANGAN

Terdapat perubahan pegawai pengelola keuangan melalui SK HK.02.02.7.06.24.17 tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Utama TA 2024, dengan perincian pegawai pengelola keuangan sebagai berikut :

Tabel 50. Perincian Pengelola Keuangan Ittama TA 2024

NO	JABATAN	SEBELUM	SESUDAH
1	KPA	Yudianto, ST, MT	Yudianto, ST, MT
2	PPK	Mochammad Fachrul Rizal, SH	Mochammad Fachrul Rizal, SH
3	PPK	Hayati Nurhistianti Adisani, S.Si, Apt	Hayati Nurhistianti Adisani, S.Si, Apt
4	PPK	Alexander Arie Sanata Dharma S, S. Farm, Apt, MA	Alexander Arie Sanata Dharma S, S. Farm, Apt, MA
5	PPSPM	Nina Melynda Dalimunthe, SE	Nina Melynda Dalimunthe, SE
6	Analisis Anggaran	Dara Putri Agnes Ristyowati, S.E.	Dara Putri Agnes Ristyowati, S.E.
7	Analisis Laporan Keuangan	Ardian Praba Agung Laksana, S.M	Ardian Praba Agung Laksana, S.M
8	Bendahara	Rizki Faiza Ismaningrum, A.Md.	Amelinda Devina Rosvitawati, S.E
9	BPP Bag TU	Amelinda Devina Rosvitawati, S.E	Rizki Faiza Ismaningrum, A.Md.
10	BPP Inspektorat I	Rizki Faiza Ismaningrum, A.Md.	Pramita Ayu Cahya, A.Md
11	BPP Inspektorat II	Megah Elisabet Sinurat, A.Md.Ak.	Megah Elisabet Sinurat, A.Md.Ak.

Pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 Satuan Kerja Ittama BPOM tidak terdapat perubahan nomor rekening, dengan rincian nomor rekening sebagai berikut:

Keterangan	Nomor Rekening
Bendahara Pengeluaran Ittama	8100124330051000
BPP Inspektorat I	8100124330051001
BPP Inspektorat II	8100124330051002
BPP Bagian TU	8100124330051003

F.3 PENGUNGKAPAN TERKAIT TRANSAKSI RESIPROKAL

Terdapat transaksi resiprokal pada Satker Ittama di TA 2024. Transaksi tersebut merupakan pelatihan kegiatan kearsipan dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tanggal 22 s.d 27 September 2024 yang diselenggarakan secara daring, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51. Perincian Transaksi Resiprokal Ittama TA 2024

NO SP2D	TANGGAL	AKUN	TANGGAL TRANSAKSI	JUMLAH	SATKER INTRACO
241751302045477	12 Desember 2024	521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2 Januari 2025	3.080.000,00	418934 - PPSDM ANRI

F.4 PENGUNGKAPAN TERKAIT PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Ittama BPOM **tidak terdapat** Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, Prioritas Nasional III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dan Prioritas Nasional VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP.

F.5 CAPAIAN OUTPUT

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal tersebut penting untuk menentukan langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan agar setiap target output dapat tercapai pada akhir periode, serta sebagai langkah evaluasi untuk merumuskan kebijakan di masa mendatang.

Sampai dengan periode Tahun 2024, output yang telah dicapai oleh Ittama BPOM sebagai berikut:

Tabel 52. Capaian Output

No	Kode Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
			Rp.	Rp.	%	Laporan	Laporan	%

						/ layanan	/ layanan	
1	4115.CAN. .001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	322.000.000	321.999.206	100%	11	13	100%
2	4115.EBA. .956	Layanan BMN	8.000.000	8.000.000	100%	1	1	100%
3	4115.EBA. .994	Layanan Perkantoran	10.565.932.000	10.395.448.50 4	100%	1	1	100%
4	4115.EBB. .951	Layanan Sarana Internal	250.000.000	249.999.300	100%	54	54	100%
5	4115.EBD .965	Layanan Audit Internal Inspektorat I (Laporan)	8.711.189.000	7.588.208.128	100%	33	33	100%
	4116.EBD .	Layanan Audit Internal Inspektorat II (Laporan)	7.836.110.000	7.464.562.620	100%	33	100	100%